



# Kejati Akan Koordinasi dengan BPK

## ■ Dalami Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II

PEKANBARU, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau hingga, Rabu (24/9) masih mempelajari dan mendalami laporan dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II di Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu pihak Kejati Riau juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Kepala Kejati Riau Setia Untung Arimuladi SH kepada wartawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari dan memperdalam dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II tersebut. "Kasusnya kita pelajari semenjak laporannya masuk ke Kejati," ujar Untung.

Jika hasilnya ditemukan ada indikasi dugaan korupsi, tambah Untung, kasusnya akan dilanjutkan pada proses penyelidikan. Ketika ditanya terkait adanya temuan kerugian negara oleh BPK dan mempersilakan aparat penegak hukum meminta hasil auditnya, Untung menegaskan, jika ada instansi lain yang mendukung mengungkap laporan masyarakat itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi tersebut.

"Oleh karena itu kita akan segera berkoordinasi dengan BPK Riau," jawab Untung.

Sebelumnya BPK Riau menemukan ada indikasi kerugian daerah sebesar Rp 4,43 miliar lebih terkait pembangunan Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II di Rohil.

Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau pada Tahun 2010 silam. Setiap tahun BPK menindaklanjuti temuan tersebut.

Dalam rekomendasinya BPK meminta kepada Pemkab Rohil untuk mengembalikan anggaran tersebut ke kas daerah. Sayangnya rekomendasi tersebut hingga saat ini belum juga ditunaikan pemkab. Bahkan hingga per 31 Desember 2013 rekomendasi itu belum dilaksanakan.

Menurut Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Riau, Mikael PH Togatorop, hasil audit ditemukan beberapa item pekerjaan pada paket kegiatan pembangunan kedua jembatan tersebut diketahui menyebabkan kerugian.

"Hal itu sudah sesuai jenis pemeriksaan yang kita lakukan dengan nomor 023/S/XVIII.

PEK/02/2010, Tanggal 18 Februari 2010," ujanya

Lebih jauh dikatakannya, pembangunan kedua jembatan dilakukan dengan pola multiyears berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang peningkatan Dana Anggaran dengan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II Tahun Anggaran 2008-2010. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dengan kontrak Nomor 630/KONTRAK-JP I/MY/2008/47.80 dan Nomor 630/KONTRAK-JP II/MY/2008/47.81 tanggal 5 Desember masing-masing senilai lebih dari Rp 213,625 miliar dan lebih dari Rp 208,864 miliar.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Pedamaran I, dan Pedamaran II telah terjadi satu kali adendum. Terdapat dua permasalahan dalam pembangunan kedua jembatan tersebut. "Permasalahan pertama terdapat perhitungan ganda atas biaya fasilitas direksi sebesar Rp 2,04 miliar lebih. Yang kedua, terdapat biaya metode of construction and engineering services yang tidak layak untuk dibayarkan sebesar Rp 5,5 miliar," jelas Mikael. (rsy)